

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Auditor sebagai salah satu profesi yang sangat penting, dituntut untuk memahami kode etik profesi dalam menjaga mutu dan kualitas pemeriksaan. Kepatuhan akuntan publik pada kode etik terdapat prinsip-prinsip dasar etika diantaranya integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Prinsip dasar tersebut harus dipatuhi oleh akuntan publik. Prinsip-prinsip ini membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk melakukan pengawasan.

Profesionalisme dan etika profesi auditor merupakan komponen krusial dalam menjaga integritas dan efektivitas pengawasan intern pemerintah. Di Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memegang peran penting dalam pengawasan ini, termasuk di wilayah Sumatera Barat. Tuntutan terhadap auditor untuk berperilaku profesional dan etis semakin tinggi seiring dengan kompleksitas tata kelola pemerintahan dan ekspektasi publik akan transparansi serta akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat profesionalisme dan penerapan etika profesi auditor pada perwakilan BPKP Sumatera Barat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampaknya terhadap kualitas pengawasan intern. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat praktik profesional dan etis auditor, serta meningkatkan efektivitas pengawasan intern pemerintah di Sumatera Barat. Harapan masyarakat terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas akan terpenuhi jika

auditor dapat menjalankan profesionalisme dengan baik sehingga masyarakat dapat menilai kualitas audit dengan baik (Gede, 2014).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Demi kepercayaan klien terhadap kinerja auditnya, maka BPKP dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya. Kode etik menjadi pedoman auditor di BPKP dalam melakukan proses auditing. Kurangnya kepercayaan masyarakat terkait tanggungjawab auditor sehingga dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan kode etik auditor di BPKP. Apakah terdapat penyelewengan pada saat melakukan pengawasan atau tidak.

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu mengacu pada pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa Kode Etik disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.

Pengawasan erat sekali kaitannya dengan perencanaan, yang mana harus ada suatu objek yang diawasi seperti program kegiatan, barulah pengawasan tersebut dapat berjalan. Pengawasan akan percuma tanpa adanya tindakan perbaikan, jika di dalam pengukuran hasil ditemukan keadaan yang tidak sesuai dengan standar yang direncanakan. Maka dari itu, pengawasan harus melakukan tindakan perbaikan untuk mengetahui apakah adanya ketidakberesan dan pengawasan berkewajiban melaporkannya kepada pihak yang berwenang apabila ditemukan. Selain itu, tugas pengawasan juga dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan.

Salah satu bentuk pengawasan yang efektif adalah pengawasan fungsional, karena setiap pelanggaran yang terjadi dapat lebih mudah dan cepat terdeteksi. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen tersebut, secara otomatis juga akan mendukung pencapaian tugas pokok lainnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana profesionalisme dan etika profesi auditor internal dalam proses pengawasan intern pemerintah, dalam penelitian yang berjudul “**Analisis profesionalisme dan etika profesi auditor dalam proses pengawasan intern pemerintah pada perwakilan badan pengawasan dan pembangunan provinsi sumatera barat**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana profesionalisme dan etika profesi auditor dalam proses pengawasan intern pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian adalah:

- a) Untuk menguji profesionalisme seorang auditor dalam proses pengawasan intern pemerintah.
- b) Untuk menguji etika profesi seorang auditor dalam proses pengawasan intern pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi untuk Penulis, Instansi dan bagi Universitas adalah sebagai berikut:

1) Bagi penulis :

- a) Menambah wawasan mengenai profesionalisme dan etika profesi auditor dalam proses pengawasan intern pemerintah.
- b) Untuk tambahan informasi penelitian selanjutnya bagi saya sebagai mahasiswa lulusan akuntansi yang ingin berprofesi sebagai akuntan publik agar dapat menyadari pentingnya profesionalisme dan etika profesi dalam proses pengawasan intern pemerintah.

2) Bagi Instansi :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami peran auditor dalam mendeteksi kecurangan.

3) Bagi Universitas Andalas :

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi laporan kegiatan magang bagi perpustakaan Universitas Andalas dan dijadikan referensi bagi mahasiswa lain dalam melakukan pembahasan yang lebih dalam berkaitan dengan Profesionalisme dan Etika Profesi Auditor dalam Proses Pengawasan Intern Pemerintah.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Adapun tempat yang dipilih sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu Pada Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Padang, Sumatera Barat, sebagai tempat untuk melaksanakan kuliah kerja lapangan/magang selama 60 (enam puluh) hari kerja dan waktu pelaksanaannya pada tanggal 22 Januari 2024 hingga 19 April 2024.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Hal yang dibahas yaitu mengenai uraian yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan magang, waktu dan tempat magang serta sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan. Hal yang dibahas dalam pendahuluan dapat mengantarkan pembaca pada pembahasan yang akan dibahas.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan ini, tujuan dan manfaat magang serta metode dan sistematika penulisan dari laporan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

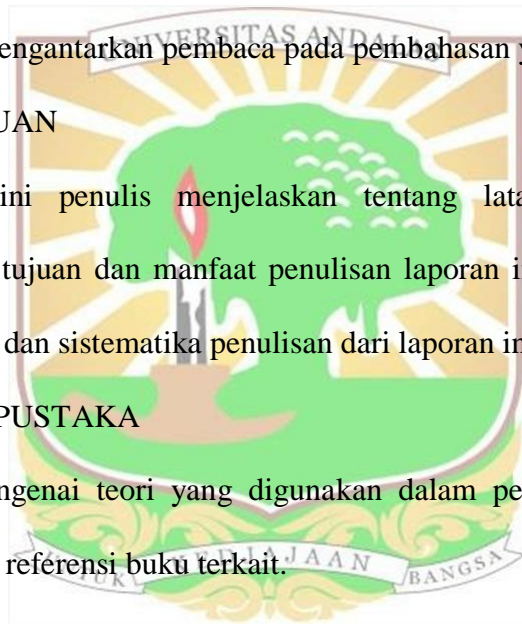
Membahas mengenai teori yang digunakan dalam penulisan laporan yang diambil dari berbagai referensi buku terkait.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Hal yang dibahas adalah profil perusahaan tempat magang, beserta visi misi perusahaan dan hal terkait lainnya mengenai perusahaan itu sendiri.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai informasi yang didapat mengenai laporan tugas akhir yang berasal dari fakta yang terjadi di lapangan dan data yang diberikan oleh perusahaan.



BAB V PENUTUP

Hal yang dipaparkan mengenai kesimpulan laporan dan saran yang diberikan penulis untuk perusahaan yang dapat dijadikan masukan dalam proses pengauditan laporan keuangan.

